

PAPUA BARAT

Nurul Arifin: RUU PDP Masih Bahas Mengenai Sanksi

Tony Rosyid - PUBLIKPAPUABARAT.COM

Jul 11, 2022 - 18:34



Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin

JAKARTA - DPR RI akan segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Melalui Komisi I DPR RI, pembahasan RUU PDP bersama Pemerintah hanya tinggal sinkronisasi saja. RUU PDP sendiri telah diinisiasi sejak tahu 2016 lalu. Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin mengatakan, saat ini pembahasan hanya tersisa terkait ketentuan sanksi

pelanggaran penggunaan data pribadi.

“(RUU PDP masih membahas) tentang sanksi administrasi dan sanksi pidana,” kata Nurul, Senin (11/7/2022). Nurul menegaskan, pembahasan sanksi belum menemui kata sepakat, sebab masih terdapat perdebatan terkait sanksi yang tepat bagi penyalahguna data pribadi.

Meski demikian, lanjut politisi Partai Golkar itu, Komisi I DPR telah mendapat waktu tambahan merampungkan pembahasan RUU PDP. Teranyar, penambahan waktu diberikan pada penutupan Masa Sidang ke-V Tahun Sidang 2021-2022. “Sudah diminta waktu perpanjangan satu kali lagi masa persidangan,” jelas Nurul.

Adapun, sambung legislator dapil Jawa Barat I tersebut, Komisi I DPR RI menargetkan proses pembahasan RUU PDP berjalan lancar, sehingga bisa segera disahkan pada masa sidang berikutnya atau Agustus mendatang. “Insya Allah kita mengejar tahun ini supaya kelar, karena (UU ini) penting banget,” komitmen Nurul. (tn/sf)